



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/07/III.05/HK/2012**

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) LAMPUNG TENGAH TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 560/0041/III.05/03/2012 tanggal 04 Januari 2012 perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut di atas, maka dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-226/MEN/2000, ditetapkan bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2012 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/Men/ VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/757/III.05/ HK/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) LAMPUNG TENGAH TAHUN 2012.
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2012 ditetapkan sebesar **Rp. 982.000,-** (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung;
 10. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 12. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung.
-